

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PANGKALAN MILITER CHINA DI DJIBOUTI, AFRIKA TAHUN 2016

Putri Adhira

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Ringroad Barat Tamantirto, Kasihan, Bantul 55138

Email: Putriadhira01@gmail.com

Abstract

In the history of Chinese military strategy has entered a new phase with their breakthrough China Development Policy Military Base in Djibouti, Africa in the year 2016. The construction of military bases is a form of military activity was a first for China throughout the history of the development of the country's military strength. This policy has a style different from earlier Chinese military cooperation. Being the strongest partners of Africa in terms of trade and global investment, this journal will provide elaboration on China's policy of strengthening partnerships with African stratgeis through slaah construction of military bases in the country located in strategic areas of Africa namely, Djibouti.

Keywords : China military bases, determinants, Africa

Intisari

Perjalanan sejarah strategi kekuatan militer China telah memasuki babak baru dengan adanya terobosan Kebijakan Pembangunan Pangkalan Militer China di Djibouti, Afrika pada Tahun 2016. Pembangunan pangkalan militer tersebut merupakan bentuk aktivitas militer yang pertama bagi China disepanjang sejarah perjalanan pembangunan kekuatan militer negara. Kebijakan ini memiliki corak yang berbeda dari kerjasama militer China sebelumnya. Menjadi mitra terkuat Afrika dalam hal perdagangan dan investasi global, jurnal ini akan memberikan elaborasi atas kebijakan China dalam menguatkan kemitraan stratgeis dengan Afrika melalui pembangunan pangkalan militernya di slaah satu negara yang berada di kawasan strategis Afrika yaitu, Djibouti.

Kata kunci : pembangunan pangkalan militer China, determinan, Afrika

PENDAHULUAN

China merupakan salah satu aktor hubungan internasional yang kini memiliki peran penting dalam tatanan global. Pada beberapa tahun terakhir, China telah menjadi salah satu negara yang geliat dan pengaruhnya patut diperhitungkan baik dalam skala regional maupun global (Ganewati Wuryandari A. E., 2011, hal. 8). Aspek politik, ekonomi, dan militer merupakan wilayah kerja China untuk menunjukkan ambisinya sebagai kekuatan adidaya global baru. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam bukunya *China's Foreign Relations* (1998) Denny Roy mengemukakan bahwa kemampuan China untuk tampil sebagai aktor superpower global di abad 21 dapat dibuktikan dengan adanya fakta kehadiran China sebagai aktor ekonomi terbesar dunia (*world's largest economy*), aktor berpengaruh dalam politik internasional (*the influential actor in international politics*), serta aktor militer kuat (*strong military actor*) yang tidak dapat terbantahkan.

Kerjasama dalam bidang militer merupakan salah bentuk upaya China dalam mewujudkan komitmen sebagai negara militer kuat global. Selain hal tersebut, kerjasama militer merupakan bentuk kesungguhan China dalam turut berpartisipasi mewujudkan stabilitas keamanan global dan mengamankan

kepentingan nasionalnya (Yasuhiro, 2014, hal. 1). Berbagai kerjasama militer dibangun China baik secara bilateral maupun multilateral. Kawasan Asia Pasifik merupakan lingkaran konsentris bagi China dalam membangun jalinan kerjasama tersebut. Pasalnya, Asia Pasifik merupakan kawasan bernilai strategis penting baik dalam segi ekonomi, politik, maupun militer. Hadirnya aktor-aktor berpengaruh global seperti Amerika Serikat, Jepang, Rusia yang cukup intens dalam mengikuti dinamika kawasan menjadi kekhawatiran sendiri bagi China (Easton, 2013, hal. 8). Kawasan Timur Tengah juga menjadi wilayah kerja baru China dalam menggandeng mitra dalam bidang militer (Dorsey, 2016, hal. 3). Eksistensi militer China juga dapat dilihat geliat dan pengaruhnya di Kawasan Amerika Latin dan di beberapa negara kawasan Afrika seperti Sudan, Zimbabwe, dan Nigeria. (Euka, 2012, hal. 1). Berdasarkan tulisan Matsuda Yasuhiro dalam sebuah esai berjudul *China's Military Diplomacy*, setidaknya terdapat tiga objek kerjasama militer yang dilakukan China yaitu, *pertama* melakukan pelatihan dan penguatan unit militer. *Kedua*, penguatan kerjasama dalam bidang senjata dan teknologi militer. *Ketiga*,

pengenalan teknologi militer terbaru. Kaitannya dengan isu pangkalan militer, China belum pernah mengusung hal tersebut sebagai bagian dari kerjasama militernya di dunia internasional.

Kebijakan pembangunan pangkalan militer China di kawasan Djibouti telah menarik perhatian komunitas internasional baik dari aktor negara, non negara, ataupun media internasional. Pasalnya, kebijakan ini menjadi terobosan baru dari pemerintah China dalam hal pertahanan dan militer dengan melakukan pembangunan pangkalan militer untuk yang pertama kalinya disepanjang sejarah kenegaraannya. Selain hal tersebut, pemilihan lokasi pembangunan juga menjadi isu penting yang menyertainya. Hal ini terjadi karena, Djibouti merupakan negara kecil (*small state*) yang berlokasi di semenanjung Pantai Timur Laut Afrika. Dalam laporan tertulisnya tertanggal 9 April 2016, BBC News menjelaskan bahwasanya Djibouti merupakan negara tandus dengan perekonomian bergantung pada sektor pelabuhan. Meskipun tergolong sebagai negara miskin, negara yang berlokasi di Selat Bab el-Mnadeb ini merupakan negara yang mempunyai peran penting dalam jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Hal ini

selaras dengan keberadannya yang juga menjadi wilayah pintu gerbang untuk menuju Terusan Suez. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Terusan Suez merupakan salah satu rute pelayaran dan perdagangan internasional tersebut di dunia. Alasan kedua yang menjadikan kebijakan pemilihan lokasi pembangunan pangkalan militer menjadi pusat perhatian publik internasional ialah terkait dengan keputusan China untuk membangun pangkalan militer di wilayah negara dimana juga terdapat salah satu bangunan pangkalan militer terbesar dari Amerika Serikat. Selain hal tersebut, karakter militer China yang lebih cenderung bercorak pertahanan di kawasan udara serta berfokus sebagai produsen alat utama sistem pertahanan (Cheng, 2015). Hal tersebut juga turut menyertai adanya indikasi perubahan strategi kekuatan pertahanan yang dibangun China saat ini.

Kebijakan pembangunan pangkalan militer pertama China tersebut telah mengisi kekosongan data perjalanan militer China di tengah tren pentingnya pembangunan pangkalan militer bagi negara maju. Terobosan tersebut menjadi suatu kebijakan yang mengindikasikan adanya faktor-faktor determinan sehingga mendorong China

untuk memutuskan melakukan pembangunan pangkalan militer sebagai bagian dari strategi nasionalnya di kancah internasional. Selain hal tersebut, sebagai aktor negara yang memiliki komitmen untuk memperbesar pengaruh di kancah global, China saat ini sedang dihadapkan pada pendefinisian kepentingan keamanan (*security interest*) di beberapa negara yang masih memiliki tingkat rendah dalam hal stabilitas.

A. Aktivitas Militer China di Djibouti

Menyusul aktivitas militer yang telah lebih dahulu dilakukan oleh beberapa negara maju lainnya di kawasan negara Djibouti, pada tanggal 21 Januari 2016 secara resmi melalui informasi yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri-nya (*The China Foreign Affairs Ministry*), China menyampaikan hasil suatu perjanjian kerjasama yang cukup merubah masa depan militer di negaranya. Perjanjian tersebut melibatkan dua aktor negara yaitu, China dan Djibouti yang saling bersepakat untuk menjalin kerjasama dalam bidang militer (Braude & Jiang, 2016). Perjanjian tersebut merupakan landasan hukum atas diijinkannya China untuk membangun dan mengoperasikan kekuatan militer di

Djibouti, Afrika. Perjanjian ini sekaligus menjadi simbol atas dimulainya aktivitas militer China di Djibouti sebagai mitra kerjasama sejak tahun 1979. Selain hal tersebut, perluasan bidang kerjasama China dan Djibouti dalam bidang militer tersebut telah melengkapi sederet bentuk kerjasama yang telah aktif dijalankan kedua negara yaitu dalam bidang ekonomi baik berupa investasi, pembangunan infrastruktur, maupun perdagangan internasional. Melalui hal tersebut, China hadir menyusul Amerika Serikat, Perancis, Jepang, dan Jerman yang telah lebih dahulu membangun dan memiliki pangkalan militer di kawasan Negara Djibouti (Orion, 2016, hal. 2).

Pembangunan pangkalan militer merupakan bentuk aktivitas militer pertama yang akan dioperasikan China di wilayah Djibouti, Afrika. Dikonfirmasi oleh perwakilan Kementerian Pertahanan China (*The China's Ministry of Defense*), bahwa China akan membangun sebuah pangkalan militer di Negara Djibouti. Pangkalan militer berbentuk "*support facilities base*" untuk tentara angkatan laut China yaitu, The People's Liberation Army-Navy (PLAN) yang akan beroperasi di Djibouti (Panda, 2016). Menurut laporan petugas dan pakar asing yang memantau perkembangan proyek dengan luas 36,4 hektar tersebut, pangkalan militer

China dibangun dengan sejumlah fasilitas yang melengkapinya. Adapun fasilitas tersebut ialah berupa pos angkatan laut yang dilengkapi dengan fitur toko senjata, sarana pemeliharaan kapal dan helikopter, serta gedung untuk menampung tentara marinir atau pasukan khusus China tersebut (Jami, 2016).

Pembangunan pangkalan militer yang telah mulai dibangun pada 8 April 2016 dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2017 tersebut merupakan hasil dari suatu proses yang cukup panjang bagi China. Pasalnya, sejak Jepang memutuskan untuk membangun pangkalan militernya pada tahun 2010 di Djibouti, China merasa perlu untuk mempertimbangkan kembali langkah strategisnya bagi masa depan militer negaranya serta peran negara dalam bidang keamanan di panggung internasional

B. Faktor Determinan China Memutuskan Membangun Pangkalan Militer di Djibouti, Afrika Tahun 2016

Kondisi dunia internasional pasca dekade 1990-an atau secara konseptual dalam kajian hubungan internasional dikenal dengan era pasca perang dingin telah menciptakan transformasi baru secara dinamis pada struktur tatanan global. Tatanan yang bersifat unipolaritas pada dekade 1990-an telah berganti menuju

struktur multipolaritas atau bahkan banyak penstudi yang menyebutnya sebagai era nonpolaritas sering dengan mulai tumbuh dan terlibatnya berbagai aktor hubungan internasional dengan berbagai tingkat kekuatannya (Muna, Adriana Elisabeth, Wuryandari, & Sriyanto, 2011, hal. 139). Namun, ditengah kompleksitas keterlibatan berbagai aktor global tersebut, sketsa struktur tatanan global tetap menjadi suatu lanskap yang dapat digambarkan secara jelas, termasuk dalam dimensi aktor global yang terlibat. China menjadi salah satu kekuatan aktor global yang pada waktu tersebut geliat dan pengaruhnya dapat diperhitungkan tidak saja dalam skala regional, namun juga secara global. Begitu juga eksistensi ini masih terjaga hingga saat ini, di tengah kompleksitas hubungan internasional abad 21.

Berbagai literatur telah mendokumentasi perjalanan kemajuan China sebagai aktor global baik dalam dimensi militer, ekonomi, maupun politik. Dalam karya jurnal **The Rise and Fall of The Great Power in The Twenty-First Century** dengan fokus analisis **China's Rise and The Fate of America's Global Power**, **Stephen G. Brooks** and **William C. Wohlforth** dari Harvard Collage menuturkan bahwa China teleha menjadi salah satu

aktor kekuatan militer global kedua setelah Amerika Serikat. Secara ekonomi China tumbuh menjadi aktor dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua setelah Amerika Serikat dan hal ini membawa konsekuensi pada porsi China yang dapat menjadi aktor dengan kapasitas pengaruh besar di tatanan global (Jacques, 2013, hal. 1).

Berdasarkan pemaparan pada paragraf-paragraf sebelumnya tersebut, maka terdapat suatu hal yang tidak dapat dikesampingkan dalam melihat dan menganalisis setiap perubahan, kemajuan, ataupun perilaku China sebagai aktor hubungan internasional. William D. Coplin dalam Teori Kebijakan Politik Luar Negerinya telah memberikan tekanan khusus terkait isu dinamika situasi internasional. Dalam teks besarnya, Coplin menyampaikan bahwa dalam membaca suatu kebijakan politik luar negeri suatu negara maka setidaknya terdapat tiga considerasi sebagai alat pendekatan pemahaman terkait determinan atau penyebab subjek negara untuk kemudian memutuskan suatu kebijakan politik luar negeri bagi negaranya. Tiga considerasi tersebut telah dijelaskan pada bab pertama dalam karya skripsi ini. Namun, sebagai ruang pembahasan secara teoritik maka penulis akan menampilkan kembali asumsi-asumsi

yang dibangun Coplin dalam Teori Kebijakan Politik Luar Negeri sebagai salah satu instrumen yang penulis gunakan untuk mendeteksi faktor-faktor determinan yang mempengaruhi China dalam memutuskan kebijakan politik luar negerinya pada tahun 2016 tersebut atas studi kasus pembangunan pangkalan militer.

Kebijakan pembangunan pangkalan militer yang telah mulai dibangun China pada 8 April 2016 di Djibouti, Afrika dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2017 tersebut, tentunya merupakan hasil dari suatu proses yang cukup panjang bagi China. 2014 menjadi tahun awalan bagi China untuk membuka dialog komunikasi dengan pemerintahan Djibouti dalam mengartikulasikan keinginannya dalam membangun suatu pangkalan militer negaranya di wilayah Djibouti. Artinya, terdapat situasi-situasi internasional yang telah mendorong China baik sebelum tahun 2014, ataupun setelahnya untuk kemudian China memutuskan kebijakan tersebut. Kaitannya dengan konteks internasional, maka sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan dalam bab pertama maka secara konteks internasional terdapat pengaruh dari adanya hegemoni berbagai aktor kuat global di kawasan Afrika sebagai

kawasan subur bagi berjalannya roda ekonomi perdagangan China.

Sama halnya dengan suatu transformasi dalam hubungan internasional baik dalam aspek, isu ataupun aktor terlibat. Kecenderungan kawasan kemitraan (geografis kemitraan) dalam pergerakan kerjasama internasional yang dioperasional oleh berbagai aktor negara-negara global juga mengalami transformasi secara signifikan. Hubungan kerjasama baik dalam bentuk bilateral ataupun multilateral pada awal pasca perang dingin, terlihat bahwasanya grafitasi kawasan Asia telah menjadi medan magnet bagi prioritas berbagai kebijakan kerjasama internasional dari berbagai aktor global khususnya bagi Amerika Serikat dan European Union (Langenhove, 2010, hal. 6).

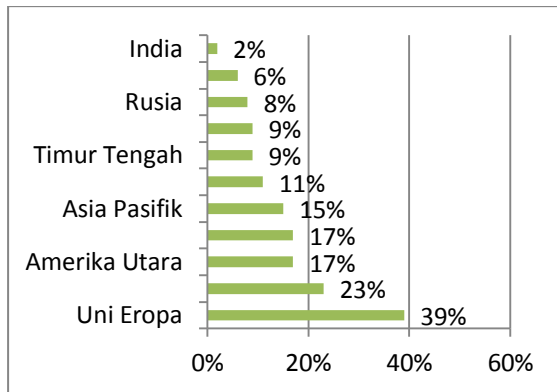
Maka Tidaklah heran apabila narasi “*pivot to Asia-Pasific*” kemudian menjadi *headline* agenda internasional dari berbagai aktor global. Amerika Serikat menjadi slaa satu aktor global yang memberikan perhatian penuh atas segala dinamika yang terjadi di kawasan. Terlebih pada era pemerintahannya, Presiden Barack Obama menetapkan kawasan Asia Pasifik sebagai wilayah lingkaran konsentris bagi negaranya dalam hal kemitraan ekonomi (Campbell & Andrews, 2013, hal. 5).

Grafitasi kecenderungan kawasan kemitraan tersebut, berkembang secara dinamis. Terdapat diaspora kawasan-kawasan baru yang menjadi gravitasi baru bagi berbagai aktor global untuk saling menanamkan pengaruh dan keterlibatannya baik secara politik, ekonomi dan militer bagi kelangsungan stabilitas masa depan negaranya masing-masing. Tanpa meninggalkan kawasan Asia Pasifik, cakupan kawasan kemitraan strategis mulai merambah di kawasan benua yang cukup lekat dengan identitas sebagai kawasan dengan negara kategori *failed state*, *collapsed state*, dan *weak state* terbanyak (Rotberg, 2004, hal. 1). Menurut Robert I. Rotberg, *failed state* ialah negara yang tidak memiliki kapabilitas untuk mengendalikan atau mengontrol wilayah otoritasnya sehingga tercipta situasi disharmoni dalam multidimensi dalam kehidupan bernegara. Sebagai contohnya, Rotberg memberikan contoh negara dengan kategori failed state ialah Sudan, Angola, Liberia, Kongo.

Afrika merupakan lingkungan yang menguntungkan bagi keberlangsungan roda ekonomi China. Pasalnya, negera tirai bambu ini pada abad 21 mulai menggiatkan kegiatan ekonominya di kawasan tersebut. Secara tinjauan *consumer market*, Afrika diprediksi pada tahun 2017 akan menjadi kawasan dengan

konsumsi produk industri terbesar kedua di dunia setelah kawasan Uni Eropa (Deloitte, 2014, hal. 6).

Gambar 4.2 Prioritas *Customer Market* Global Tahun 2017



Sumber : Deloitte, *Africa: A 21st Century View* (Deloitte, 2014, hal. 6).

Gambar diagram tersebut menunjukkan bahwasanya terdapat potensi pasar yang begitu besar di kawasan Afrika, khususnya bagi China sebagai aktor ekonomi global yang memerlukan ruang pemasaran atas produk industri-industri domestiknya. Namun, secara konteks internasional. China bukanlag satu-satunya kekuatan asing yang memainkan peran baik secara politik, ekonomi, maupun militer di kawasan tersebut. Melainkan, berbagai aktor kekuatan global turut memberikan jejak perannya di kawasan yang kini menjadi grafitasi baru dalam berbagai sistem kerjasama internasional. Beberapa kekuatan asing tersebut ialah Amerika Serikat, Uni Eropa, Perancis, Jepang, Spanyol yang secara kuantitatif

memiliki peran yang signifikan di kawasan Afrika.

Pemaparan-pemaparan telah memberikan gambaran secara global bahwa China mendapatkan peringatan atas upaya negaranya dalam melakukan aktivasi interaksi kemitraan di kawasan Afrika. China bukan menjadi kekuatan tunggal yang berperan di kawasan tersebut. Melainkan China bagian dari segelintir kekuatan asing yang mampu melihat potensi wilayah Djibouti khususnya dan Afrika secara luas. Setiap negara memiliki cara tersendiri dalam menjaga hubungannya dengan wilayah dan kawasan tersebut. Namun, terdapat corak utama yang dapat dilukiskan dalam melihat kompleksitas kekuatan asing baik di Djibouti, ataupun di kawasan Afrika. Hal tersebut ialah terkait adanya penyelarasan penggunaan kekuatan ekonomi dan militer secara terpadu. Militer menjadi instrumen negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Prancis dalam menciptakan stabilitas kawasan yang dapat menopang laju perekonomian yang dijalankan di Djibouti dan kawasan Afrika. Namun, China sejak terjalinnya kemitraan pada tahun 1956 di kawasan Afrika, negara tersebut hanya terfokus pada operasional kekuatan ekonomi. Meskipun secara data terlihat aktivitas ekonomi China mengungguli dari negara lainnya. Hal ini telah memberikan sinyal tersendiri

bagi China untuk kemudian merestrukturisasi strategi kemitraan di negara dan kawasan yang sangat berperan penting bagi laju kemajuan negaranya tersebut. Oleh karena itu, pembangunan militer menjadi salah satu respon dari situasi-situasi rill yang dihadapi China secara internasional, khususnya yang terjadi di negara Djibouti dan kawasan Afrika. Sedangkan secara kawasan, Djibouti, Afrika merupakan wilayah yang memiliki nilai geostratgis tinggi bagi negara-negara yang memiliki fokus pada bidang perdagangan dan investasi.

C. Dukungan *Policy Influencer's* China dalam Penyusunan Kebijakan Pembangunan Pangkalan Militer

Peran politik dalam negeri terhadap penyusunan politik luar negeri suatu negara sebagaimana terjabarkan dalam Teori William D. Coplin, Kebijakan Politik Luar Negeri, dimobilisasi oleh aktor-aktor politik yang dalam teori disebut sebagai *policy influencers*. Sebagaimana telah terjabarkan dalam penjelasan dalam landasan teoritik pada bab pertama, terdapat empat tipe *policy influencers* dalam politik dalam negeri suatu negara kaitannya dengan penyusunan politik luar negeri yaitu, (1) birokratis, (2) kepentingan, (3) Partai,

(4) Massa yang mempengaruhi. Setiap *influencers* memiliki kontribusi masing-masing dalam penyusunan politik luar negeri suatu negara. Sebagaimana kembali pada definisi kebijakan politik luar negeri, Kebijakan politik luar negeri suatu negara pada hakikatnya merupakan hasil dari perpaduan dan refleksi antara elemen-elemen yang ada di dalam kondisi domestik negara yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi internasional (Wuryandari, Elisabeth, Mashad, Muna, & Sriyanto, 2011, hal. 1).

Kebijakan pembangunan pangkalan militer China di Djibouti, Afrika pada tahun 2016 merupakan keputusan politik dari China. Kaitannya dengan aktor *policy maker*, dalam sistem politik China dikenal adanya hubungan vertikal power sebagai struktur kekuasaan negara dengan basis ideologi komunis yang geliat dan pengaruhnya kini dapat terukur sebagai aktor skala global. Tiga vertikal power tersebut ialah keberadaan The Communist Party of China (CPC), The State Council dan The People's Liberation Army (PLA). Terlepas dari adanya *overlapping* atau tumpang tindih dalam aspek fungsi antara CPC dan The State Council karena keduanya memiliki pemimpin yang sama, namun kaitannya dengan penyusunan politik

luar negeri China, ketiga aktor tersebut merupakan *official foreign policy actors* di China (Jokobson & Knox, 2010, hal. 4). Bertolak kembali pada kebijakan pembangunan pangkalan militer china di Djibouti, Afrika pada tahun 2016 maka secara berkesinambungan akan dipaparkan terkait pembahasan mengenai ketiga aktor tersebut dalam penyusunan politik luar negeri China yang cukup memiliki spektrum yang berbeda dari karakter kebijakan sebelumnya pada bidang militer. Dalam hasil penelitian yang penulis lakukan pada berbagai data sekunder eleven pada pokok permasalahan dalam skripsi ini, maka terdapat dua *policy influencers* dalam penyusunan kebijakan pembangunan pangkalan militer China di Djibouti, Afrika pada tahun 2016. Yaitu, (1) birokrasi yang mempengaruhi dan (2) partai yang mempengaruhi. Berikut ialah pemaparan terkait kedua *policy influencers* tersebut:

**1. *Beureaucratic Infulencer:*
Adanya Peran Presiden dan The
People's Liberation Army (PLA)**

Salah satu tipe *policy influences* yang ada di setiap negara modern adalah *beuraucratic influencer* (birokrat yang mempengaruhi) (Coplin & Marbun,

Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis, 2003, hal. 82). Secara lebih terang, Coplin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *beuraucratic influencer* menunjuk pada keterlibatan berbagai individu serta organisasi di dalam lembaga eksekutif pemerintah suatu negara yang berkontribusi dalam proses penyusunan politik luar negeri. Melihat *beuraucratic influencer* pada sistem penyusunan politik luar negeri China maka dapat tergambarkan pada lembaga eksekutif pemerintahan yang ada di China. Richard A. Kaplen dalam karya tulisannya yang berjudul *An Analysis of China;s Foreign Policy and National Security Decision-Making Support Structure (U)*, menjelaskan bahwa dalam struktur pemerintahan China terdapat tiga sub vertikal power yaitu, (1) The Communist Party of China (CPC), (2) The Chinese Goverment dan (3) The People's Liberation Army (PLA). Peran CPC dalam proses penyusunan kebijakan akan dijelaskan dalam poin selanjutnya yaitu pada pembahasan *party policy influencer*. Oleh karena itu, pada sub bab ini akan dipaparkan data-data berserta pembahasannya

terkait peran The Chinese Government dan The People's Liberation Army (PLA) sebagai struktur lembaga eksekutif di pemerintahan China karena kedua lembaga tersebut merupakan bagian dari aktor politik domestik dan non domestik China (Kaplen, 2005, hal. 3).

The Chinese Government merupakan aktor-aktor yang terlibat dalam operasional pemerintahan China. Kebijakan pembangunan pangkalan militer China di Djibouti, Afrika pada tahun 2016 merupakan suatu hasil politik luar negeri yang telah disepakati bersama oleh para *official foreign Policy Actors*. Kaitannya dengan hal tersebut, Presiden Xi Jinping selaku presiden China yang masih menjalankan masa kepemimpinan politiknya, memiliki peran kuat dalam pembentukan visi penguatan peran maritim China secara global. Dalam tulisannya, Linda Jakobson dan Dean Knox menyebutkan bahwa dalam struktur vertikal power dalam sistem pemerintahan China, kedudukan dan peran presiden mempunyai nilai strategisitas yang tinggi yaitu sebagai kendali utama pada ketiga elemen *power structure*

China tersebut. Oleh karena itu, visi Presiden Xi Jinping memiliki porsi besar dalam kontribusi penyusunan kebijakan pembangunan pangkalan militer China di Djibouti, Afrika sebagai sebuah basis kekuatan armada laut China secara internasional.

"*China as A Maritime Power*" merupakan *grant-vision* Presiden Xi Jinping untuk secara serius membangun dan mengembangkan kapabilitas-kapabilitas China sebagai aktor yang geliat dan pengaruhnya dapat diperhitungkan secara konteks internasional (Bickford, 2016, hal. 1-2). Menurut peneliti senior, Thomas J. Bickford, Presiden Xi Jinping memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya membangun kekuatan militer China lebih masive ditatanan domestik maupun internasional. Hal ini tidka lain karena menurut Xi Jinping, negara yang besar seperti China hanya dapat dijaga stabilitasnya atas adanya peran militer yang kuat. Kekuatan militer tersebut akan mendorong pembangunan China secara strategis dalam beberapa hal lainnya seperti, politik dan ekonomi. Selain itu, Presiden Xi Jinping juga menjelaskan bahwa

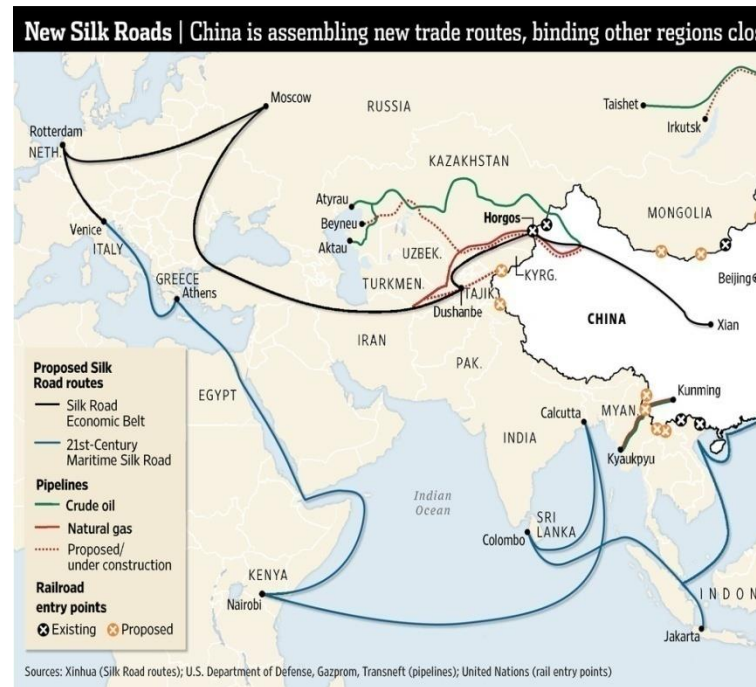
China merupakan negara yang memiliki sejarah kuat sebagai kekuatan maritim global pada masa lampau sehingga penting baginya untuk membangun kekuatan tersebut kembali.

Selain visi tersebut, Presiden Xi Jinping merupakan pemimpin yang sangat konsen dalam memperhatikan pembangunan China tidak saja secara domestik, melainkan secara global. Salah satu kebijakan strategisnya dalam penguatan perekonomian perdagangan global yaitu, kebijakan *One Belt One Road (OBOR) as China's Vision of Connectivity*. Sejak menjadi "paramount leader" atau pemimpin tertinggi China pada tahun 2013., Presiden Xi Jinping telah meluncurkan insiatif-inisiatif dari dua kebijakan negaranya yaitu, terkait urusan dalam negeri dan luar negeri. Keseluruhan kebijakan diorientasikan untuk memastikan berjalannya stabilitas politik dan melanjutkan pertumbuhan ekonomi China sebagai pemain utama baru ditatanan global. Salah satu kebijakan untuk urusan luar negeri China, Presiden Xi Jinping memilih untuk menerapkan kebijakan visi

strategisnya yaitu, *One Belt One Road* yang merupakan bagian dari upaya China untuk menguatkan peran ekonominya di "New Silk Road" atau "Jalur Sutera Baru". Narasi *Silk Road* merupakan sejarah kuno dan China ingin tetap menjadikan jalur sutera sebagai bagian dari jalur pertumbuhan ekonominya secara global (Aris, 2016, hal. 1).

Melalui kebijakan *One Belt One Road*, China berupaya untuk membangun satu sistem infrastruktur sebagai pintu perjalanan bagi China untuk beraktivitas secara lebih intens ke seluruh penjuru dunia (connectiity function). Konektivitas tersebut dibangun dengan tujuua untuk mendorong peningkatan hubungan perdagangan anatara Eurasia, Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, serta Afrika. Visi pembangunan konektivitas tersebut telah juga menyita perhatian publik global (Aris, 2016, hal. 1). Oleh karena itu, relevan dengan konsep pangkalan militer yang dibangun China di wilayah Djibouti, Afrika yan merupakan basis logistik untuk mendorong stabilitas aktivitas perdagangan China di kawasan

Afrika serta sepanjang laut hindia dan Teluk Aden melalui kebijakan *New Silk Road China* yaitu, *China Maritime Silk Road* dari sebelumnya negara masih mengandalkan jalur sutera secara daratan. Berikut merupakan rute *China Maritime Silk Road* dimana terlihat salah satu lokasi jalur mengarah pada kawasan samudera yag meuju ke Afrika dan Terusan Suez sebagai lokasi yang dekat dari Djibouti, Afrika.



Sumber : Wall Street Journal, China Sees Itself at Center of New Asian Order (Page, 2014)

Gambar 4. 5 *China Maritime Silk Road Route*

Beureaucratic influencer kedua dalam peninjauan proses penyusunan kebijakan pembangunan pangkalan militer China di Djibouti, Afrika pada tahun 2016 ialah adanya peran dari The People’s Liberation Army (PLA) sebagai basis militer China. Kaitanya dengan kebijakan PLA memiliki peran signifikan karena PLA mendapatkan tugas dari Presiden Xi Jinping untuk mendukung visi “*China as A Global Maritime Power*” . Peran PLA dimanifestasikan mellauai pemberian dukungan pengembangan untuk mengatur jalan keamanan *China Maritime Silk Road* karena rute yang ada merupakan jalur penting dan strategis bagi aktivitas

perdagangan China secara internasional. Setidaknya di jalur Samudera Hindia sebagai salah satu rute *China Maritime Silk Road*, China mempunyai dua kepentingan utama yaitu untuk keuntungan ekonomi dan mewujudkan keamanan jalur laut. Oleh karena itu, pada tahun 2015 PLA membuat beberapa transit kapal di wilayah anatra Djibouti dan Pelabuhan Yaman Aden dan Hodeidah. Selain itu, PLA mempunyai peran kuat untuk memberikan jaminan keamanan bagi China dalam kaitannya dengan isu pembajakan laut (*piracy*) yang marak terjadi di kawasan Laut Somalia dan mengganggu berlangsungnya aktivitas-aktivitas ekonomi China di kawasan tersebut (Clemens, 2015, hal. 4). Oleh karena itu, adanya kebijakan pembangunan pangkalan militer China di Djibouti, Afrika menjadi penting bagi PLA untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai *support system* dari visi Presiden Xi Jinping yaitu, *China as Maritime Global Power*.

2. *Partisan Influencer*: Peran The Communist Party of China

Partisan Influencer merupakan tipe *policy influencer* kedua dari aktor politik dalam negeri suatu negara yang dapat mempengaruhi penyusunan suatu politik luar negeri negaranya. Dalam sistem politik dengan partai tunggal maka peran

partisan influencer atau partai yang mempengaruhi mempunyai peran yang kuat dan kendali yang kuat dalam penyusunan politik luar negeri (Coplin & Marbun, Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis, 2003, hal. 84). Kaitannya dengan China dan kebijakan pembangunan pangkalan militer negaranya di Djibouti, Afrika pada tahun 2016 maka akan terlihat jelas peran dari The Communist Party of China (CPC) dalam pembentukan kebijakan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam struktur politik China terdapat ketimpangan fungsi antara struktur The Communist Party of China dan The China Government karena keduanya memiliki pemimpin yang sama yaitu, presiden yang sedang berkuasa yang juga merupakan sekretaris jenderal dari politbiro China yang merupakan lembaga tertinggi di CPC yang berwenang dalam menyetujui kebijakan-kebijakan yang ada di China.

D. Dorongan Kekuatan Ekonomi dan Militer China sebagai Determinan China Membangun Pangkalan Militer

Dibalik pertumbuhan pesat ekonomi China tersebut, transformasi secara struktur yang cukup dramatis, khususnya pada bidang urbanisasi yang

cepat dan industrialisasi telah membawa spektrum ekonomi baru bagi China. Pada awal ekonominya, China merupakan negara yang sangat mengandalkan roda ekonomi pada sektor agraris. Namun, reformasi ekonomi telah membawa China tumbuh menjadi negara industri berbasis produksi. Saat ini, sektor manufaktur merupakan sektor produksi untuk ekspor China secara global (Lin, 2015, hal. 215). Dengan demikian dapat ditarik satu benang merah bahwa aktivitas ekonomi China yang bersifat lintas negara merupakan kegiatan ekonomi utama yang sangat penting bagi pertumbuhan dan kemajuan China, baik berupa aktivitas ekport ataupun investasi. Berikut ialah diagram dari persebaran sektor pendapatan China hingga China dapat tumbuh sebagai aktor ekonomi yang diperhitungkan secara Global pada abad 21. pertumbuhan ekonomi China sangat ditentukan atas aktivitas setidaknya dua kegiatan utama yaitu, investasi dan ekspor hasil industri dalam negerinya. Untuk selanjutnya, berikut ialah sektor industri yang menjadi salah satu penopang perekonomian China.

Tiga sektor industri tersebut ialah. Industri primer (pertanian), industri sekunder (konstruksi dan manufaktur) serta industri tersier

(sektor jasa). Sesuai dengan data pada tahun 2013, idustri primer menyumbang 10% dari PDB , sedangkan indutri sekunder menyumbang 44%, dan insytri tersier menyumbang angkat terbesar yaitu 46%.

Keseluruhan data tersebut menjadi refleksi dari tidak hanya peran aktivitas ekonomi domestik saja yang menopang tercapainya stabilitas ekonomi China. Namun, konteks internasional juga menjadi determinan penting dalam setiap perkembangan ekonomi yang China lakukan. Terlihat dari data-data sebelumnya bahwa pemasukan utama negara sangat ditentukan pada angka investasi dan ekspor hasil industri domestik. Oleh karena itu, penting bagi China untuk senantiasa menjaga, meningkatkan, dan mengamati setiap dinamika-dinamika internasional, khususnya dalam hal ini ialah terkait dengan perkembangan situasi ekonomi investasi dan perdagangan global.

Salah satu kawasan penting bagi keberlangsungan pertumbuhan ekonomi China pada abad 21 ialah Afrika. Kecenderungan aktivitas ekonomi China baik dalam bidang investasi dan ekspor produk industri di kawasan tersebut selaras dengan kebijakan pemerintah China terkait '*pivot to africa*'. Hal ini telah terjelaskan dalam

elaborasi terkait determinan politik domestik China pada sub bab sebelumnya. Termasuk dalam aktifitas ekonomi yang dibangun dan dijalankan China di Djibouti sebagai lokasi tujuan kebijakan politik luar negerinya yaitu, pembangunan pangkalan militer China. Begitu banyak jejak aktifitas ekonomi baik ekspor dan impor yang melibatkan China baik dengan Djibouti secara langsung, maupun dengan berbagai negara di kawasan Afrika secara luas.

Menurut William D. Coplin dalam teorinya, Kebijakan Politik Luar Negeri, selain dipengaruhi oleh konteks internasional sebagai determinan politik luar negeri suatu negara. Keberadaan politik luar negeri suatu negara juga dipengaruhi oleh adanya pertimbangan dalam aspek atau konsiderasi pada kondisi ekonomi dan militer negara tersebut baik secara domestik maupun internasional sebagai dampak dari konteks internasional yang mempengaruhi. Oleh karena itu, pemaparan kondisi ekonomi China yang telah terurai pada paragraf-paragraf sebelumnya tersebut akan ditelaah lebih mendalam terkait korelasi ekonomi China secara domestik dan internasional sehingga mendorong China untuk memutuskan membangun pangkalan militernya di djibouti, Afrika sebagai suatu produk politik luar negeri

negaranya. Korelasi ini akan dilihat dalam dua pembagian aspek yaitu, aspek kondisi ekonomi dan kondisi militer. Untuk pertama serta melanjutkan bahasan sebelumnya, maka penulis akan memberikan elaborasi sistemasi pada aspek ekonomi terlebih dahulu.

Adanya peningkatan kerjasama kemitraan yang dibangun China di Djibouti, Afrika melalui kebijakan pembangunan pangkalan militer China pada tahun 2016 merupakan cerminan adanya keterkaitan erat antara *national interest* China baik di wilayah Djibouti pada khususnya dan Afrika pada umumnya. Secara tinjauan geopolitik, pertanyaan tersebut sudah dapat terjawab melalui pembahasan yang telah diuraikan penulis pada sub bab pertama dalam bab ini. Namun, perlu untuk melakukan penelitian pada aspek lain dalam melihat faktor-faktor pendorong China pada tahun 2016 memutuskan untuk membangun pangkalan militer negaranya di Djibouti, Afrika. Secara ekonomi, determinan ini dapat dideteksi melalui adanya telaah pada aktivitas-aktivitas ekonomi baik berupa investasi dan ekspor maupun impor negara industri China baik di wilayah Djibouti maupun Afrika secara luas. Hal ini selaras dengan penjelasan sebelumnya bahwa

militer merupakan instrumen terpadu yang dapat menopang kelancaran dalam keberlangsungan roda kerjasama ekonomi suatu negara.

Data-data terpapar diatas merupakan wujud riil adanya aktivitas ekonomi yang sangat strategis baik antara China dengan Djibouti, ataupun China dengan negara di kawasan Afrika secara luas. Namun, fakta adanya rivalitas kekuatan asing yang berperan di Afrika baik dalam konteks politik, ekonomi ataupun militer tidak menempatkan China sebagai aktor tunggal mitra kawasan. Melainkan, terdapat berbagai kekuatan asing yang juga memiliki jejak eksistensi kuat di kawasan seperti: Amerika Serikat, Prancis, Jepang dan Uni Eropa. Negara-negara tersebut, telah menanamkan pengaruh baik secara politik, ekonomi dan militer di Djibouti ataupun di kawasan Afrika. Kebutuhan pemeliharaan kemitraan antara satu negara dengan negara lainnya saling tumpang tindih karena semua memiliki tujuan yang hampir sama, khususnya dalam bidang ekonomi yaitu pemeliharaan dan peningkatan aktivitas investasi, impor dan ekspor produk industri negaranya. Sedangkan dalam konteks militer, militer menjadi instrumen penting yang harus dibangun negara dalam pemeliharaan situasi

stabilisasi wilayah guna mendukung kelancaran keberlangsungan roda ekonomi negaranya serta sebagai unit untuk mengamati dinamika di wilayah Djibouti dan kawasan Afrika. Oleh karena itu, perlu bagi China untuk mulai merestrukturisasi strategisnya di wilayah Djibouti dan Afrika sehingga baik kebutuhan politik, ekonomi dan militernya sebagai aktor global dapat terjaga dengan hasil keuntungan yang baik bagi negaranya. Oleh karena itu, sangat selaras dan bersesuaian apabila pada tahun 2016 China memutuskan untuk membangun pangkalan militer negaranya di Djibouti, Afrika sebagai instrument penopang aktivitas ekonomi, politik dan militer negaranya di panggung internasional, khususnya di kawasan Afrika.

KESIMPULAN

Perjalanan sejarah strategi kekuatan militer China telah memasuki babak baru dengan adanya terobosan **Kebijakan Pembangunan Pangkalan Militer China di Djibouti, Afrika pada Tahun 2016**. Memiliki tipologi berbeda dari corak kekuatan militer China sebelumnya, pada awal Januari 2016, melalui Juru Bicara Kementerian Luar China (*The China's Foreign Ministry*), Hong Lei secara resmi menyampaikan

pada publik internasional bahwa China telah menjalin kesepakatan dengan pemerintahan Negara Djibouti terkait rencana pembangunan pangkalan militer China yang akan dilokasikan di wilayah negara tersebut. Pembangunan pangkalan militer tersebut merupakan bentuk aktivitas militer yang pertama bagi China disepanjang sejarah perjalanan pembangunan kekuatan militer negara.

Bertolak dari hasil penelitian pada karya skripsi ini, maka secara konteks internasional terdeteksi bahwa adanya peran hegemoni dari berbagai kekuatan asing di wilayah geostrategis Djibouti, Afrika telah menjadi penyebab atau pendorong China untuk pada tahun 2016 memutuskan membangun pangkalan militer pertamanya.

Secara politik domestik China, adanya peran Presiden Xi Jinping, The People's Liberation Army (PLA), serta The Communist Party of China (CPC) telah menjadi determinan yang mendorong China untuk memutuskan kebijakan tersebut. Pasalnya, Presiden Xi Jinping telah memiliki beberapa inisiatif baru dalam kebijakan luar negeri China pasca terpilihnya sebagai pemimpin China pada tahun 2013. Kebijakan tersebut ialah menyangkut, "*China as A Maritime Power*" dan "*One Belt One Road*" China di jalur *Maritime Silk Road*. Selain itu, PLA juga

memiliki peran yang relevan sehingga pada tahun 2016 China memutuskan untuk membangun pangkalan militernya di Djibouti, Afrika yaitu, PLA mempunyai peran kuat untuk memberikan jaminan keamanan bagi China dalam kaitannya dengan isu pembajakan laut (*piracy*) yang marak terjadi di kawasan Laut Somalia dan mengganggu berlangsungnya aktivitas-aktivitas ekonomi China di kawasan tersebut. Oleh karena itu, adanya kebijakan pembangunan pangkalan militer China di Djibouti, Afrika menjadi penting bagi PLA untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai *support system* dari visi Presiden Xi Jinping yaitu, *China as Maritime Global Power*. Sedangkan CPC memiliki peran dengan adanya hasil kongres ke-18 mereka pada tahun 2012 dengan hasil China memutuskan secara bersama dalam "*build China into a strong maritime power*" sehingga dapat mendorong China tampil sebagai aktor maritim global. Hal ini juga menjadi penanda bahwa kepemimpinan The Communist Party of China kini telah berorientasi pada kerja politik yang menjadikan pembangunan kekuatan maritim sebagai bagian penting untuk mencapai tujuan nasional China dan juga merespon adanya dominan kekuatan maritim yang masih tersentral bagi Amerika Serikat

Sedangkan dalam tinjauan kondisi ekonomi dan militer negara, secara ekonomi China merupakan negara Industri yang pendapatan negara sangat bergantung pada aktivitas industri (eksport dan import) serta investasi. Afrika merupakan mitra aktivitas utama bagi China dalam ketiga *economic sources* China tersebut. Namun, fakta adanya rivalitas kekuatan asing yang berperan di Afrika baik dalam ekonomi ataupun militer tidak menempatkan China sebagai aktor tunggal mitra kawasan. Melainkan, terdapat berbagai kekuatan asing yang juga memiliki jejak eksistensi kuat di kawasan seperti: Amerika Serikat, Prancis, Jepang dan Uni Eropa. Negara-negara tersebut, telah menanamkan pengaruh baik secara politik, ekonomi dan militer di Djibouti ataupun di kawasan Afrika. Kebutuhan pemeliharaan kemitraan antara satu negara dengan negara lainnya saling tumpang tindih karena semua memiliki tujuan yang hampir sama, khususnya dalam bidang ekonomi yaitu pemeliharaan dan peningkatan aktivitas investasi, impor dan ekspor produk industri negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris, S. (2016). *One Belt, One Road: China's*. Zurich: CSS Analyses in Security Policy.
- Azwar, S. (1998). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sedangkan dalam konteks militer, militer menjadi instrumen penting yang harus dibangun negara dalam pemeliharaan situasi stabilisasi wilayah guna mendukung kelancaran keberlangsungan roda ekonomi negaranya serta sebagai unit untuk mengamati dinamika di wilayah Djibouti dan kawasan Afrika. Oleh karena itu, perlu bagi China untuk mulai merestrukturisasi strategisnya di wilayah Djibouti dan Afrika sehingga baik kebutuhan politik, ekonomi dan militernya sebagai aktor global dapat terjaga dengan hasil keuntungan yang baik bagi negaranya. Terlebih, aktor ekonomi lainnya di Afrika juga telah memiliki sebuah pangkalan militer khusus negaranya sebagai insrument penopang aktivitas ekonomi mereka. Selain hal tersebut, adanya kendala ekonomi China di kawasan Teluk Aden yaitu, adanya ancaman gangguan keamanan laut : *piracy* juga telah mendorong China untuk mereformasi struktur kekuatan militer negaranya agar dapat merespon ancaman tersebut.

- Bajpai, P. (2014, Oktober 31). *China's GDP Examined: A Service-Setor Surge*. Retrieved Desember 1, 2016, from <http://www.investopedia.com/articles/investing/103114/chinas-gdp-examined-servicesector-surge.asp>
- Bickford, T. J. (2016). *Haiyang Qiangguo: China as a Maritime Power*. Virginia: China Studies Division of CNA.
- Bojiang, Y. (2006). REDEFINING Sino-Japanese Relations after Koizumi. *The Washington Quaterly*, VOL 29 No.4.
- Braude, J., & Jiang, T. (2016, Maret 31). *Djibouti Is Jumping*. Retrieved November 21, 2016, from Foreign Policy Research Institute FPRI: <http://www.fpri.org/article/2016/03/djibouti-is-jumping/>
- Campbell, K., & Andrews, B. (2013). *Explaining the US 'Pivot' to Asia*. London: Chatham House.
- Cheng, D. (2015). *China's Pivot to The Sea: The Modernizing PLA Navy*. Washington D. C.: The Heritage Foundation.
- Chow, G. C. (2004). *Economic Reform and Growth in China*. New Jersey: Peking University Press.
- Chun, Z. (2015). *The Sino-Africa Relationship: Toward a New Strategic Partnership*. Retrieved Desember 1, 2016, from <https://www.lse.ac.uk/IDEAS/.../SR-016-Chun.pdf>
- Clemens, M. (2015). *The Maritime Silk Road and the PLA*. Virginia: CNA Conference Facility.
- Coplin, W. D., & Marbun, M. (2003). *Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo.
- Coplin, W. D., & Marbun, M. (2003). *Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru Bandung.
- Correlissen, S., Cheru, F., & Shaw, T. M. (2012). *Africa and International Relations In The 21st Century*. New York: Palgrave Macmillan.
- CRI. (2016). *China Contribution to The UN Effort*. Beijing: CRI.
- d'Almada, A. C. (2014, Desember 14). U.S. "vs." China in Africa: A Message to President Obama and Premier Li Keqiang. Retrieved Desember 1, 2016, from http://www.huffingtonpost.com/andre-correa-dalmeida/us-vs-china-in-africa-eco_b_5978980.html
- Dawaleh, H. I., & Styan, D. (2012). *Djibouti's Strategic Position In The Horn of Africa*. London: Birkbeck College, University of London.
- Dellios, R. (2005). *China: The 21st Century Superpower?* Barcelona.

- Deloitte. (2014). *Africa: A 21st Century View*. London: Deloitte.
- Denlinger, P. (2012, Desember 27). *What is the difference in composition of GDP in The US and China?* . Retrieved Desember 1, 2016, from <https://www.quora.com/What-is-the-difference-in-composition-of-GDP-in-the-US-and-China>
- Dorsey, J. M. (2016). *China & The Middle East: Tilting Towards Iran?* Singapore: RSIS Nanyang Technological University .
- DPR. (2012). *Peningkatan Kekuatan Militer China*. Jakarta: DPR RI.
- Dubé, F. (2016, Oktober 5). *China's Experiment in Djibouti*. Retrieved Desember 1, 2016, from The Diplomat: <http://thediplomat.com/2016/10/chinas-experiment-in-djibouti/>
- Easton, I. (2013). *China's Military Strategy in The Asia-Pasific*. Project 2049 Institute.
- Ebrahim, Z. T. (2015, April 25). *China's New Silk Road: What's In It For Pakistan?* . Retrieved Desember 2, 2016, from <http://www.dawn.com/news/1177116>
- Enuka, C. (2012). China's Military Presence in Africa. *Journal of Political Studies* , 1.
- Fearon, J. D. (1998). *Domestic Politics And Foreign Policy*. Chicago: Annual Review.
- Gamache, L., Hammer, A., & Jones, L. (2013). *China;s Trade and Investment Relations With Africa*. New York: United States International Trade Commission (USITC) Executive Briefings on Trade .
- Ganewati Wuryandari, A. E. (2011). *Politik Luar Negeri Indonesia Dii Tengah Arus Perubahan Politik Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ganewati Wuryandari, D. M. (2008). *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- GlobalSecurity. (2016). *Djibouti - China Relations*. Retrieved November 21, 2016, from Global Security: <http://www.globalsecurity.org/military/world/djibouti/forrel-prc.htm>
- Gokmen, S. R. (2010). *Geopolitics and The Study of International Relations*. Turkey: IR Middle East Technical University.
- IFC, I. F. (2013). *Djibouti Country Profile 2013*. The World Bank.
- Igbinoba, E. (2016). *Economic Implication of China's Military Base in Djibouti*. South Africa: Center for Chinese Studies.
- INDC. (2015, Agustus). *Intended Nationally Determined Contribution of the Republic of Djibouti*. p. 2.
- Institute, A. R. (2012, Oktober 22). *Between Extremes: China and Afrika*. Retrieved Desember 1, 2016, from Africa Research Institute: Understanding AfricaToday:

<http://www.africaresearchinstitute.org/newsite/publications/between-extremes-china-and-africa/>

Jacques, M. (2013). *How China Will Change The Global Political Map*. Washington: Transatlantic Academy.

Jakartagreater. (2016, Maret 2016). *Lima Kekuatan Militer Bangun Pangkalan di Djibouti*. Retrieved November 21, 2016, from Jkaarta Greater: <http://jakartagreater.com/lima-kekuatan-militer-bangun-pangkalan-di-djibouti/>

Jami, A. I. (2016). *Cina mulai Pembangunan Pangkalan Militer di Afrika*. Jakarta: <http://internasional.republika.co.id/>.

Jatmika, S. (2016). *Hubungan Internasional di kawasan Afrika*. Yogyakarta: Samudra Biru.

Jatmika, S. (2016). *Hubungan Internasional Di Kawasan Afrika*. Yogyakarta: Samudera Biru.

Jokobson, L., & Knox, D. (2010). *New Foreign Policy Actors In China*. Sweden: Stockholm Peace Research Institute (SIPRI).

Kaplen, R. A. (2005). *An Analysis of China's Foreign Policy nd National Security Decision-Making Support Structure (U)*. Virginia: Conterintellegence Field Activity (CIFA).

Kompasiana. (2015, Agustus 14). *Afrika: MAsihkah benua Tanpa Harapan?* Retrieved November 17, 2016, from Kompasiana: http://www.kompasiana.com/kanopi_feui/afrika-masihkah-benua-tanpa-harapan_555f21da927e614d198b45c8

Lam, W. (1997). *Impact of China's Trade and Foreign Investmnet Reform on The world Ecoomy*. Ottawa: Strategic Investment Analysis Micro-Economic Policy Analysis Industry Canada.

Langenhove, L. V. (2010). *The EU as Global Actor in A Multipolar World and Multilateral 2.0 Environtment*. Brussels: Academia Press.

Lawrence, S. V., & Martin, M. F. (2013). *Understanding China's Political System*. Maryland: Congressional Reseach Service (CRS).

Lin, J. Y. (2015). *China and the Global Economy*. Retrieved Desember 1, 2016, from <http://www.frbsf.org/economic-research/files/Lin.pdf>

Mas'od, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.

McDevitt, R. A. (2016). *Becoming a Great "Maritime"*. Arlington: CNA Analysis and Solution.

- Melati, I. (2013). *Upaya Cina dalam Mempertahankan Komunisme Pasca Runtuhnya Uni Soviet*. Retrieved November 10, 2016, from eJournal Ilmu Hubungan Internasional: ejournal.hi.fisip-unmul.org
- Muna, M. R., Adriana Elisabeth, D. M., Wuryandari, G., & Sriyanto, N. (2011). *Politika Luar Negeri Indonesia Di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nur, A. F., Arya, D., Putra, I., Caroline, R., & Januriswanti, Y. (2013, Oktober 9). *Sistem Pemerintahan China*. Retrieved November 10, 2016, from <https://www.scribd.com/doc/174695886/46646164-Sistem-Pemerintahan-China-pdf>.
- Oladipo, T. (2015, Juni 16). *Why are There So Many Military Bases in Djibouti?* Retrieved November 21, 2016, from BBC: <http://www.bbc.com/news/world-africa-33115502>
- Omar, S. (2015). *Djibouti Geothermal Development*. Nairobi: East African Power Industry EAPIC.
- Orion, A. (2016, Februari 1). The Dragon's Tail at the Horn of Africa: A Chinese Military Logistics Facility in Djibouti . *INSS Insight No. 791* , p. 2.
- Ozyurt, S. (2010). *China's Economic Outlook after 30 Years of Reform* . France: Laboratoire Montpelliérain d'Economie Théorique et Appliquée.
- Page, J. (2014). *China Sees Itself at Center of New Asian Order*. New York: Wall Street Journal.
- Panda, A. (2016, Februari 26). *Confirmed: Construction Begins on China's First Overseas Military Base in Djibouti*. Retrieved November 21, 2016, from The Diplomat: <http://thediplomat.com/2016/02/confirmed-construction-begins-on-chinas-first-overseas-military-base-in-djibouti/>
- Perlo-Freeman, S., Fleurant, A., & Wezeman, P. D. (2015). Trends in World Military Expenditure, 2014. *SIPRI Fact Sheet* , 1.
- Pujiati, U. (2014). *Catatan Penting Tentang Karakteristik Benua*. Retrieved 2016, from https://www.google.co.id/search?biw=1366&bih=613&noj=1&tbm=isch&sa=1&q=peta+benua+afrika&oq=peta+benua+afrika&gs_l=img.3..017j0i67k1j012.17302.20260.0.20420.18.10.0.0.0.787.1175.3-1j6-1.2.0...0...1.1.64.img..16.2.1174.0.t1gyYTczf4Q#imgsrc=ddZjkIbDhc0USM
- RI, K. (2014). Peluang Ekspor Ke Nigeria. *Warta Ekspor* , 4.
- Rotberg, R. I. (2004). *When State Fail: Causes and Consequences*. Cambridge: Princeton University Press.
- Roy, D. (1998). *China's Foreign Relations*. London: Macmillan Press LTD.

Safitri, I. A. (2014). Pemberian Bantuan Amerika Serikat kepada Somalia sebagai Bentuk Pembendungan Kekuatan Cina di Afrika. *Jurnal Analisis HI Vol. 3 No. 1* , 271.

Saiman, A. (2016). *Diplomasi Ekonomi Indonesia Di Afrika Dari Retorika Menuju Realita*. PPT.

Salmon, T. C., & Imber, M. F. (2008). *Issues In International Relations 2nd Edition*. New York: Routledge.

Sari, A. P. (2016). *China Mengaku 40 Negara Dukung Klaimnya di Laut China Selatan*. CNN Indonesia.

Suzuki, T. (2016). *The Political Possibilities of China's "Party-State System"*. Tokyo: Japan Digital Library.

Uckert, M. B. (1995). *China as an Economic and Military Superpower: a Dangerous Combination?* Alabama: Air University.

Wikipedia. (2015, Januari 30). *Daftara Negara Menurut Jumlah tentara*. Retrieved November 21, 2016, from Wikipedia Ensiklopedia Bebas: https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_jumlah_tentara

World, T. O. (2016). *Djibouti*. Retrieved November 18, 2016, from Operation World: <http://www.operationworld.org/djib>

WTO. (2015). *International Trade Statistics 2015*.

Wuryandari, G., Elisabeth, A., Mashad, D., Muna, M. R., & Sriyanto, N. (2011). *Politik luar Negeri Indonesia Di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wuryandari, G., Elisabeth, A., Mashad, D., Muna, M., & Sriyanto, N. (2011). *Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

wuryandari, G., Mashad, A. E., Muna, M. R., & Sriyanto, N. (2011). *Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yani, Y. M. (2007). *Makna Pengembangan Kekuatan Militer China*. Bandung: Universitas Padjajaran.

Yasuhiro, M. (2014). *China's Military Diplomacy*. Tokyo: NIDS Security Report.

Yuliantoro, N. R. (2012). *Menuju Kekuatan Utama Dunia: Sekilas Politik Luar Negeri Cina (1st ed.)*. Yogyakarta: Institute of International Studies (IIS) Universitas Gadjah Mada (UGM).

Yuliantono, B. A. (2009). *Strategi Militer China*. Jakarta: FISIP UI.

